

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UANG PALSU
DI POLRESTA SURAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun Oleh:

WISNU LINTANG KARTIKA

NIM.C.100.100.028

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 1 April 2015

Pembimbing I



(Muhammad Iksan, S.H., M.H)

Pembimbing II



(Hartanto, SH., M.Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

INVESTIGATION OF THE CRIME OF COUNTERFEIT MONEYPLAYERS IN POLICE SURAKARTA

WisnuLintangKartika

Faculty Of Law

Muhammadiyah University of Surakarta

2015

E-mail: lintangtung92@gmail.com

ABSTRAK

Berangkat dari rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di wilayah hukum Polresta Surakarta? (2) Hambatan-hambatan apa yang ditemukan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di wilayah hukum Polresta Surakarta dan tata cara mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan? (1) Adapun pelaksanaan penyidikan tindak pidana meliputi: Pemeriksaan TKP; Pembuatan Berita Acara; Pemeriksaan barang bukti; Penggeledahan dan Penyitaan; Keterangan ahli; Penangkapan dan penahanan; Pemeriksaan tersangka; Resume; Pelimpahan berkas (2) Hambatan-hambatan yang timbul dalam penyidikan tindak pidana uang palsu, meliputi: (a) Masyarakat kurang konstruktif merespon tindak pidana uang palsu; (b) Minimnya perlindungan hukum terhadap korban. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah: (a) Pengaturan kembali mengenai tindak pidana uang palsu dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga lebih dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan; (b) Diberlakukannya prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian, mengenai penanganan kasus-kasus yang berkenaan dengan tindak pidana uang palsu. Pemberlakuan prosedur semacam ini harus dipastikan untuk dapat menyelesaikan kasus dengan adil dan berlandaskan hukum.

Kata Kunci : Penyidikan; PidanaUangPalsu; Polresta Surakarta.

ABSTRACT

Departing from the formulation of the problem of this research are: (1) How is the investigation of the criminal counterfeit money in the jurisdiction of the Police Surakarta? (2) Barriers what investigators found in the implementation of criminal investigations against counterfeit money in the jurisdiction of the Police Surakarta and procedures to overcome the obstacles that are found? (1) The implementation of criminal acts include: Examination of the scene; Making Minutes; Examination of evidence: A search and seizure; Expert testimony; Arrest and detention; Examination of the suspect; Resume; Delegation of the file (2) Barriers arising in the investigation of criminal offenses of false money, include: (a) the lack of a constructive community respond to the crime of counterfeiting; (B) The lack of legal protection for victims. Efforts to overcome these barriers are: (a) The reorganization of the crime of counterfeit money in the statutory provisions, so it can cover a lot of behavior that until now has not been covered by the legislation; (B) The implementation of specific procedures for law enforcement agencies, especially the police, concerning the handling of cases relating to the crime of counterfeiting. Enforcement procedures of this kind must be ensured in order to resolve the case by fair and lawful.

Keywords: Investigation; PidanaUangPalsu; Police Surakarta.

PENDAHULUAN

Interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan akan senantiasa terdapat suatu keselarasan antara satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupannya, manusia harus berperilaku baik serta tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tersebut dibutuhkan adanya suatu peraturan atau hukum. Peraturan atau hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat supaya terwujud ketertiban, keamanan dan kedamaian. Dengan adanya suatu peraturan hukum, diharapkan akan mengingatkan kepada manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk dapat berperilaku baik dengan tidak melanggar peraturan atau hukum yang ada. Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini sifatnya pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.¹

Hukum pidana mengatur tentang pengertian suatu perbuatan yang dapat dilakukan, perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan perbuatan mana yang digolongkan sebagai tindak pidana, termasuk ancaman pidananya. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk: 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; 2) Menentukan kapan dan hal-hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar

¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal. 63.

larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan; 3) Menentukan dengan cara apa dan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Menurut Satochid Kartanegara, perbuatan meniru mata uang atau uang kertas itu bukan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memang tidak mempunyai hak untuk membuat mata uang atau uang kertas tersebut, melainkan juga dapat dilakukan oleh orang yang mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membuat mata uang, misalnya dengan memakai bahan-bahan yang disediakan oleh pemerintah, mencetak mata uang yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah mata uang yang ditentukan oleh pemerintah.³

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di wilayah hukum Polresta Surakarta? (2) Hambatan-hambatan apa yang ditemukan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di wilayah hukum Polresta Surakarta dan tata cara mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di wilayah hukum Polresta Surakarta. (2) Untuk mengkaji hambatan-hambatan yang ditemukan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di wilayah

² Moeljatno, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Hal. 20.

³ PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 167-168.

hukum Polresta Surakarta dan tata cara mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan.

Manfaat penelitian adalah: (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang Ilmu Hukum, khususnya pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di wilayah hukum Polresta Surakarta. (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyidik Polri dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu berdasar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian tentang proses penyidikan tindak pidana uang palsu dari aspek peraturan perundang-undangan (yuridis) dan dalam praktek hukum di Polresta Surakarta (empiris). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁴

Metode analisis data dengan menggunakan metode secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis, terperinci dan menyeluruh mengenai penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di Polresta Surakarta. Analisis bahan hukum didasarkan pada prinsip konsistensi logis antara asas-asas hukum yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ditulis dalam skripsi ini, dengan melihat kemungkinan terjadinya penyimpangan

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 32.

asas. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu menarik kesimpulan penelitian terhadap kasus tertentu kemudian digunakan untuk menyimpulkan penyelesaian kasus pada umumnya di Polresta Surakarta.

HASIL PENELITIAN dan PAMBAHASAN **Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Uang Palsu di Wilayah Hukum Polresta Surakarta**

Sesuai dengan Pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum bahwa: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.⁵

Dalam penyidikan ini polisi memegang peranan, walaupun jaksa yang akhirnya akan menggunakan hasil-hasil yang telah diperoleh itu untuk kepentingan menuntut terdakwa ke sidang pengadilan. Akan tetapi sudah jelas bahwa tidak dapat dilakukan sendiri untuk itu. Oleh karenanya adanya bantuan dari pejabat-pejabat lain. Untuk berhasilnya pekerjaan penuntutan maka sudah sewajarnya jika jaksa dapat mengawasi, mengkoordinir dan memberi petunjuk-petunjuk pada pejabat-pejabat penyidik yang membantu dalam pengumpulan bukti-bukti tersebut.⁶

Baik buruknya suatu penyidikan tergantung pada cara-cara menanganinya. Penyidikan yang baik yang hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian menurut Undang-undang, akan sangat membantu pada berhasilnya pekerjaan

⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, hal. 17.

⁶ *Ibid*, halaman 26.

penuntutan. Dalam rangka pemantapan kedudukan, organisasi dan fungsi penegak hukum dalam pemeriksaan pendahuluan, perlu dimantapkan hubungan antara polisi dan jaksa dalam bidang penyidikan.

Polisi dengan segala kelengkapan penyidikan dan pengusutan diharapkan dapat memperlancar tugas penyelesaian pengajuan perkara pidana ke pengadilan yang akan dilakukan oleh penyidik. Dalam rangka ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku jaksa bertugas untuk memberikan petunjuk-petunjuk, mengkoordinir dan mengawasi alat-alat penyidik. Hubungan fungsional antara tugas penyidik dan tugas penuntutan dalam suatu proses penyidikan adalah tidak lain dari pada tindakan persiapan tugas penuntutan. Penuntutan yang baik sangat tergantung pada penyidikan yang baik, oleh karenanya hubungan kerja antara kejaksan dan kepolisian haruslah dilihat dan diarahkan untuk peningkatan prestasi kerja yang bermanfaat bagi masyarakat, guna mencari kebenaran dan keadilan melalui sarana hukum.⁷

Tidak perlu khawatir bahwa tugas polisi yang demikian itu akan mengurangi kedudukan sebagai unsur pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, yang merupakan salah satu aspek tugas kepolisian. Dalam tugas kepolisian preventif ada yang diatur dalam berbagai peraturan Undang-undang, tetapi ada pula yang tidak tegas dalam hukumnya dan hanya didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah. Mengenai hal yang terakhir ini sering dipermasalahkan sampai dimana kewenangan kepolisian yang demikian dapat ditolerir dalam suatu negara hukum.⁸

⁷ Yahya Harahap, 1993, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Jakarta: Pustaka Kartini, hal. 321.

⁸ *Ibid*, halaman 327.

Masalah teknis pemeriksaan berada dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Sebagaimana diketahui, titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari tersangkalah akan diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diperlakukan asas akusator. Asas di mana pemeriksaan dilakukan dengan memposisikan terdakwa sebagai subyek pemeriksaan.⁹

Selain itu dalam penangkapan perlu disertakan surat perintah penangkapan yang tembusannya diberikan kepada keluarga tersangka, segera setelah penangkapan dilakukan. Aturan ini benar-benar memenuhi tuntutan kesadaran masyarakat dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga tersangka yang ditangkap. Ketentuan ini juga akan memberi keterangan bagi pihak keluarga dan tersangka sendiri. Sebab pihak keluarga dan tersangka sudah mengetahui dengan pasti hendak kemana tersangka dibawa dan diperiksa. Dengan ketentuan ini, pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan secara lisan harus dianggap tidak sah. Karena bertentangan dengan ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP. Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang mungkin timbul dalam penangkapan, dan agar penangkapan mempunyai arti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan namun tidak melanggar ketentuan KUHP, dapat dilakukan oleh penyidik tindakan-tindakan penangkapan yang tetap memperhatikan hak-hak tersangka yang ditangkap.

⁹*Ibid*, halaman 334.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat diri. Tersangka harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai obyek. Yang diperiksa bukan tersangka tetapi perbuatan tindak pidana dilakukannyalah yang menjadi obyek pemeriksaan. K arah kesalahan tindak pidana yang dilakukannya itulah pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah sampai diperoleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebagai Ilustrasi:

Laporan Polisi No. Pol. :A/LP/366/V/2014/Jateng/Resta Ska tanggal 31Mei 2014.

Diduga telah terjadi tindak pidana kedapatan, menyimpan dan membawa uang palsu sebanyak 9 (sembilan) lembar uang kertas seratus ribuan dengan nomor seri yang semuanya sama SEE331273 yang berada di dalam kantong plastik warna putih yang disimpan di dalam dashboard mobil Isuzu Panther Nopol H-8899-YG yang dilakukan oleh Tersangka EKO HARIYADI, ST sewaktu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil yang sebelumnya dikendarai oleh tersangka yang sebelumnya telah diamankan mengingat tersangka sewaktu mengendarai mobil telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan selanjutnya dilakukan pengejaran dan setelah berhasil diamankan tersangka dan mobil dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan uang palsu sebanyak 9 (sembilan) lembar uang kertas seratus ribuan yang nomor serinya semuanya sama SEE331273, kejadian tersebut diketahui pada hari sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 WIB di halaman Satreskrim Polresta Surakarta atau setidaknya berada di wilayah hukum Polresta Surakarta.

Analisis dari kasus diatas sebagai berikut: (a) Diduga telah terjadi tindak pidana dengan sengaja kedapatan, menyimpan dan membawa uang yang diketahuinya sebagai uang palsu yang disimpan atau diletakkan di dalam dashboard mobil Isuzu Panther Nopol H-8899YG milik tersangka EKO HARIYADI, ST dengan cara bahwa semula pada hari sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 22.30 WIB sewaktu tersangka EKO HARIYADI, ST mengendarai mobil dalam keadaan mabuk atau setelah minum minuman keras tersangka telah melanggar lampu merah di perempatan Sumber, Banjarsari, Surakarta dan perbuatan tersebut diketahui langsung oleh petugas dari Satlantas Polresta Surakarta yang sedang melaksanakan patroli, kemudian dilakukan pengejaran dan setelah di berikan isyarat untuk berhenti tersangka tetap tidak mau berhenti dan tetap melaju dengan kecepatan tinggi selanjutnya dilakukan pengejaran, setelah sampai di perempatan panggung Jebres, Surakarta tersangka EKO HARIYADI, ST yang saat itu mengendari mobil Isuzu Panther H-8899-YG berhasil diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan tersangka EKO HARIYADI, ST tidak bisa menunjukkan surat identitas dari pada mobil tersebut dan di dalam mobil di temukan beberapa BPKB dan STNK serta beberapa plat nomor kendaraan sehingga petugas merasa curiga kemudian tersangka EKO HARIYADI, ST berikut mobilnya dibawa ke Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; (b) bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan secara fisik identitas daripada mobil milik tersangka EKO HARIYADI, telah di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar uang kertas seratus ribuan dengan nomer seri semuanya sama yang diduga sebagai uang palsu, pada saat di temukan uang palsu tersebut dalam keadaan berada di dalam kantong plastik warna putih yang disimpan di dalam dashboard

mobil milik tersangka EKO HARIYADI, ST dan sewaktu dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti tersebut tersangka EKO HARIYADI, ST saat itu juga menyaksikan dan melihat langsung barang bukti tersebut ada/atau di temukan di dalam dashboard mobil miliknya yang diketahui sebagai uang palsu, (c) dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya untuk bukti berupa uang kertas yang diketahui palsu sebesar Rp. 900.000,- atau sebanyak 9 (sembilan) uang kertas seratus ribuan yang nomor serinya sama tersebut telah dimintakan pendapat atau penjelasan dari pihak Bank Indonesia selaku Saksi Ahli untuk menyatakan dan menguatkan bahwa barang bukti tersebut memang benar palsu.

Dari analisis tersebut di atas dapat di simpulkan sebagai berikut: Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi serta bukti-bukti pendukung lainnya, maka penyidik/penyidik pembantu berpendapat bahwa tersangka EKO HARIYADI, ST dapat disangka atau diduga melakukan tindak pidana Barang Siapa yakni kedapatan, menyimpan dan membawa secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan pidana denda paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Penyidik/penyidik pembantu berkeyakinan bahwa perkara tersangka dapat untuk dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam rumusan *Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*.

Adapun pelaksanaan peyidikan tindak pidana uang palsu di Polresta Surakarta terhadap tersangka Eko Haryadi, ST meliputi tindakan berupa: (a) Penangkapan terhadap tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan; (b) Penahanan terhadap tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara

Penahanan; (c) Penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dan 9 (sembilan) lembar uang kertas seratus ribuan yang diduga uang tersebut adalah palsu dengan nomor seri semuanya sama yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan telah dimintakan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Surakarta; (d) Pemeriksaan saksi sehingga didapat alat bukti keterangan saksi-saksi; (e) Pemeriksaan tersangka Eko Haryadi, ST sehingga didapat alat bukti keterangan tersangka; (f) Kemudian dilakukan pembahasan berupa analisa kasus dan analisa yuridis dengan dasar yang digunakan adalah Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; (g) Pembuatan resume oleh penyidik/penyidik pembantu lalu dibuatkan kesimpulan; (h) Setelah berkas lengkap lalu dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dalam hal penyidikan, tersangka memiliki hak yang dijamin Undang-undang, diantaranya:¹⁰ (1) Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, (2) Hak tersangka perkaranya segera diajukan ke pengadilan, (3) Hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, (4) Salah satu hal yang paling penting untuk diingat penyidik, sejak permulaan pemeriksaan sampai selesai, penyidik harus berdiri diatas landasan prinsip hukum praduga tak bersalah.

¹⁰ Heri Purwanto, Penyidik Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, tanggal 18 Oktober 2014, di Polresta Surakarta.

Hambatan-hambatan yang Ditemukan Penyidik dalam Pelaksanaan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Uang Palsu di Wilayah Hukum Polresta Surakarta dan Tata Cara Mengatasinya

Dari berbagai kasus kejahatan uang palsu, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini relatif rendah, padahal patut untuk dipahami bahwa kejahatan pemalsuan uang nampaknya sebagian besar merupakan kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional, yakni: (1) Pemalsuan mata uang rupiah pada umumnya dilakukan oleh para residivis. Hal ini kemungkinan terjadi dikarenakan hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku sangat ringan, (2) Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku kejahatan pemalsuan uang tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Polresta Surakarta diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tindak pidana pemalsuan uang. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan uang, antara lain: (1) Masyarakat kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana uang palsu. Kejahatan atau tindak pidana uang palsu masih selalu membayangi dan menakutkan masyarakat, apalagi bila diingat bahwa pelaku tindak pidana ini sudah menggunakan teknologi canggih, sikap dan perilaku masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana uang palsu yang juga didasarkan pada persepsi bahwa sulit untuk membedakan uang palsu dengan asli tanpa alat deteksi atau kepekaan terhadap ciri-ciri fisik yang tidak dikuasai masyarakat; (2) Minimnya perlindungan hukum yang dirancang

secara khusus untuk tindak pidana uang palsu; (3) Kurang mendapat tanggapan yang positif dari personil peradilan pidana. Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa korban kejahatan uang palsu yang menjadi korban seringkali cemas akan reaksi personil peradilan pidana terhadap viktimisasi yang dialaminya; (4) Korban tindak pidana uang palsu tidak melaporkan atau tidak diproses. Dalam hal ini tidak dilaporkannya atau tidak diprosesnya korban tindak pidana uang palsu membawa konsekuensi bahwa pelaku tidak dibebani hukum atas dampak tindak pidana uang palsu yang diderita oleh korban. (5) Ketiadaan perlindungan hukum bagi korban

Pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah tindak pidana uang palsu seharusnya berfokus pada masyarakat itu sendiri, yakni dengan mengubah persepsi mereka tentang tindak pidana uang palsu. Namun, upaya yang berjangka sangat panjang ini, selayaknya telah dapat ditunjang oleh sejumlah upaya lain yang lebih dekat ke sasaran, misalnya: (1) Pengaturan kembali mengenai tindak pidana uang palsu dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga lebih dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan; (2) Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap korban kejahatan uang palsu; (3) Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban kejahatan uang palsu; (4) Diberlakukannya prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian, mengenai penanganan kasus-kasus yang berkenaan dengan tindak pidana uang palsu; (5) Diadakannya pelatihan para petugas penegak hukum mengenai persoalan tindak pidana uang palsu, termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah ini; (6) Memberdayakan

organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mempedulikan masalah tindak pidana uang palsu

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, penyidikan tindak pidana uang palsu dilakukan oleh penyidik kepolisian. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana uang palsu di Polresta Surakarta dengan tersangka (Eko Haryadi, ST) meliputi tindakan berupa: (a) Penangkapan terhadap tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan; (b) Penahanan terhadap tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan; (c) Penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dan 9 (sembilan) lembar uang kertas seratus ribuan yang diduga uang tersebut adalah palsu dengan nomor seri semuanya sama yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan telah dimintakan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Surakarta; (d) Pemeriksaan saksi sehingga di dapat alat bukti keterangan saksi-saksi; (e) Pemeriksaan tersangka (Eko Haryadi, ST) sehingga di dapat alat bukti keterangan tersangka; (f) Kemudian dilakukan pembahasan berupa analisa kasus dan analisa yuridis dengan dasar yang digunakan adalah Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; (g) Pembuatan resume oleh penyidik/penyidik pembantu lalu dibuatkan kesimpulan; (h) Setelah berkas lengkap lalu dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kedua, hambatan-hambatan yang timbul dalam penyidikan tindak pidana uang palsu, meliputi: (a) Masyarakat kurang konstruktif merespon tindak pidana uang palsu, (b) Minimnya perlindungan hukum terhadap korban, (c) Tindak

pidana uang palsu terlambat dilaporkan atau tidak dilaporkan sehingga tidak diproses.

Ketiga, pemecahan untuk mencegah tindak pidana uang palsu seharusnya berfokus pada masyarakat itu sendiri dan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah: (a) Pengaturan kembali mengenai tindak pidana uang palsu dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga lebih dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan, (b) Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban tindak pidana uang palsu, (c) Diberlakukannya prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian, mengenai penanganan kasus-kasus yang berkenaan dengan tindak pidana uang palsu. Pemberlakuan prosedur semacam ini harus dipastikan untuk dapat menyelesaikan kasus dengan adil dan berlandaskan hukum, (d) Memberdayakan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mempedulikan masalah tindak pidana uang palsu.

Saran

Pertama, ditujukan kepada masyarakat itu sendiri bahwa perlu adanya kesadaran dari masyarakat dalam menindak dan turut campur tangan apabila dilingkungannya terjadi tindak pidana pemalsuan uang, yang seharusnya dilakukan adalah dengan melaporkan kepada kepolisian atau penegak hukum lainnya.

Kedua, ditujukan kepada aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat, jangan sampai timbul diskriminasi dalam memberikan

pelayanan dalam masyarakat. Sehingga masyarakat merasa mendapatkan keadilan dalam hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Lamintang, Theo, dan PAF. Lamintang. 2009. *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rosita, Lily dan Hari Sasangka. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang